



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai penghargaan atas kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 16).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja Daerah, selanjutnya disebut dengan TKD adalah penghargaan berupa tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil atas kinerjanya dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja.
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS dan CPNS Pemerintah Provinsi Gorontalo dan PNS Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah PNS dan CPNS yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. PNS Pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo.

5. Pejabat Struktural adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Fungsional Tertentu adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemangku Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Staf adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pemerintah Provinsi Gorontalo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 bulan berkenaan.
10. Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan atau jabatan

## BAB II

### PENERIMA TKD

#### Pasal 2

- (1) Penerima TKD adalah PNS dan Calon PNS.
- (2) PNS penerima TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo yang bekerja pada instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo;
  - b. PNS pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TKD setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun.
- (4) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan TKD setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun, kecuali menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu.
- (5) PNS Provinsi yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberikan TKD berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo.

## BAB III

### KINERJA

#### Pasal 3

Kinerja yang dinilai berdasarkan atas kinerja yang dicapai dalam satu masa penilaian dan bobot pekerjaan.

#### Pasal 4

- (1) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu, terdiri dari indikator sebagai berikut:
  - a. Disiplin : 30%
  - b. Tanggungjawab : 20%
  - c. Kerjasama : 15%
  - d. Inovasi : 5%
  - e. Produktifitas : 30%
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk jabatan struktural, terdiri dari indikator sebagai berikut:
  - a. Disiplin : 20%
  - b. Tanggungjawab : 20%
  - c. Kepemimpinan : 20%
  - d. Inovasi : 10%
  - e. Produktifitas : 30%
- (3) Penilaian kinerja untuk masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Sangat Baik : 90 - 100
  - b. Baik : 80 - 89
  - c. Cukup Baik : 70 - 79
  - d. Kurang Baik : 60 - 69
  - e. Tidak Baik : 50 - 59
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini

#### Pasal 5

- (1) Bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Uraian Tugas;
  - b. Resiko;
  - c. Jumlah Anggaran;
  - d. Volume Pekerjaan.
- (2) Bobot pekerjaan untuk jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu di masing-masing SKPD terdapat pada Lampiran II Peraturan ini

#### Pasal 6

- (1) Nilai kinerja yang diperoleh selama masa kinerja adalah kinerja yang dicapai dalam Pasal 4 dikalikan dengan bobot pekerjaan dalam Pasal 5 dibagi 100.

- (2) Perhitungan nilai kinerja masing-masing jabatan terdapat pada Lampiran III Peraturan ini.

#### Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja penerima TKD dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diverifikasi oleh pimpinan SKPD/Unit Kerja.

#### BAB IV

#### KATEGORI, BESARAN, DAN PERHITUNGAN

#### Pasal 8

TKD yang diberikan digolongkan dalam 3 (tiga) kategori:

- a. TKD Jabatan Struktural;
- b. TKD Jabatan Fungsional Tertentu;
- c. TKD Jabatan Fungsional Umum.

#### Pasal 9

- (1) Dasar perhitungan TKD untuk pejabat struktural adalah sebagai berikut:
- |   |     |              |
|---|-----|--------------|
| a. Eselon I B   | Rp. | 17.500.000,- |
| b. Eselon II A (Asisten)  | Rp. | 9.500.000,-  |
| c. Eselon II A  | Rp. | 8.250.000,-  |
| d. Eselon II B  | Rp. | 6.250.000,-  |
| e. Eselon III A (Kepala Kantor/<br>Sekretaris Badan/Dinas/<br>Kabag Umum Sekretariat DPRD | Rp. | 4.000.000,-  |
| f. Eselon III A   | Rp. | 3.750.000,-  |
| g. Eselon III B   | Rp. | 3.100.000,-  |
| h. Eselon IV  | Rp. | 2.600.000,-  |
- (2) Dasar perhitungan TKD untuk PNS Jabatan Fungsional Umum adalah Rp. 1.600.000,-.
- (3) Terhadap PNS yang bekerja di Kantor Perwakilan Jakarta ditambahkan 25% (dua puluh lima persen) dan Seksi Penghubung Makassar ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Gubernur dapat menambahkan besaran TKD Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi PNS yang memiliki Pangkat Pembina Tingkat I Golongan IVb keatas dengan Keputusan Gubernur.

- (5) Dasar perhitungan besaran TKD untuk Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana pada Lampiran IV Peraturan ini.

#### Pasal 10

Bagi PNS atau Calon PNS yang mengikuti Diklat Teknis atau Diklat Dalam Jabatan diberikan TKD.

#### Pasal 11

- (1) Besarnya TKD yang diterima setiap masa kinerja adalah Nilai Kinerja Pegawai (NKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikalikan dengan Dasar Perhitungan TKD untuk masing-masing penerima sebagaimana dalam Pasal 9.
- (2) Besarnya TKD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan PPh Pasal 21).
- (3) Setiap pembayaran TKD harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Perhitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran V Peraturan ini.
- (5) Jumlah TKD yang dibayarkan untuk setiap SKPD dan perhitungannya terdapat pada Lampiran VI Peraturan ini.

#### Pasal 12

- (1) TKD dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (2) TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (3) Pembayaran TKD untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

#### Pasal 13

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Sekretaris Daerah dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan TKD Tambahan.

#### Pasal 14

Tunjangan Kinerja Daerah untuk Tahun Anggaran 2014 dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

## Pasal 15

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena alasan pribadi selama 14 (empat belas) hari kerja dalam 1 (satu) masa kinerja atau mengikuti pendidikan formal dalam bentuk tugas belajar di luar Provinsi Gorontalo tidak memperoleh TKD.
- (2) PNS yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dikenakan pengurangan dan atau tidak mendapatkan TKD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hukuman Disiplin Ringan:
    1. sebesar 20% dari TKD 1 periode penilaian untuk hukuman disiplin ringan teguran lisan ;
    2. sebesar 30% dari TKD 1 periode penilaian untuk hukuman ringan tertulis;
    3. sebesar 50% dari TKD 1 periode penilaian untuk hukuman ringan pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - b. Hukuman Disiplin Sedang:
    1. sebesar 75% dari TKD 1 periode penilaian untuk hukuman sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    2. sebesar 100% dari TKD 1 periode penilaian untuk hukuman sedang penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
    3. sebesar 2 (dua) bulan untuk hukuman sedang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
  - c. Hukuman Disiplin Berat :
    1. sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    2. sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
    3. sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman ringan pembebasan dalam jabatan.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 15 Januari 2014  
GUBERNUR GORONTALO,

Ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Ttd

WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIS DAERAH  
RIDWAN YASIN, SH, MH  
NIP.196304261993031001



BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 04

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR : 04 TAHUN 2014  
TANGGAL : 15 JANUARI 2014  
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2014

---

1. LAMPIRAN I : PENILAIAN KINERJA
2. LAMPIRAN II : BOBOT PEKERJAAN
3. LAMPIRAN III : FORMAT PERHITUNGAN KINERJA
4. LAMPIRAN IV : DASAR PERHITUNGAN TKD UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
5. LAMPIRAN V : FORMAT PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 (PPh 21)
6. LAMPIRAN VI : DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

GUBERNUR GORONTALO

TTD

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 04 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 JANUARI 2014

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2014

---

**PENILAIAN KINERJA**

**1. Disiplin**

Kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas, kepatuhan jam kerja, menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- a. **Sangat baik** : Yaitu tidak pernah tidak hadir, tidak pernah terlambat atau tidak pernah pulang lebih cepat, selalu menghadiri kegiatan-kegiatan kenegaraan dan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam 1 (satu) periode penilaian TKD.
- b. **Baik** : Secara kumulatif 1-2 kali terlambat/pulang cepat, selalu menghadiri kegiatan-kegiatan kenegaraan dan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam 1 (satu) periode penilaian TKD.
- c. **Cukup baik** : Kumulatif 3-4 kali terlambat/pulang cepat atau maksimal 2 hari izin atau maksimal 4 hari sakit atau kumulatif 1-2 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan kenegaraan dan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam 1 (satu) periode penilaian TKD.
- d. **Kurang baik** : Secara kumulatif 5-6 kali terlambat/pulang cepat atau maksimal 2 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau 5 hari sakit atau kumulatif 3-4 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan kenegaraan dan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam 1 (satu) periode penilaian TKD.
- e. **Tidak baik** : Secara kumulatif lebih dari 7 kali terlambat/pulang cepat atau lebih dari 3 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau lebih dari 5 hari sakit atau lebih dari 5 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan kenegaraan dan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam 1 (satu) periode penilaian TKD.

**2. Tanggung Jawab**

Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku disertai dengan hasil kerja.

- a. **Sangat baik** : Sangat bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas yang diberikan dan sesuai target disertai dengan hasil kerja yang sangat memuaskan.
- 

- b. **Baik** : Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan target disertai dengan hasil kerja yang memuaskan.
- c. **Cukup baik** : Cukup bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan target disertai dengan hasil kerja yang cukup memuaskan.
- d. **Kurang baik** : Kurang bertanggungjawab terhadap tugas sesuai dengan target disertai dengan hasil kerja yang kurang memuaskan.
- e. **Tidak baik** : Tidak bertanggungjawab terhadap tugas sesuai dengan target disertai dengan hasil kerja yang tidak memuaskan.

### 3. Kerjasama

Kemampuan menjalin hubungan kerja yang baik dalam unit kerjanya atau dengan unit kerja yang lain atau dengan pihak lain di luar organisasi dalam melaksanakan tugas.

- a. **Sangat baik** : Sangat mampu menjalin dan membina hubungan kerja.
- b. **Baik** : Mampu menjalin dan membina hubungan kerja.
- c. **Cukup baik** : Cukup mampu menjalin dan membina hubungan kerja.
- d. **Kurang baik** : Kurang mampu menjalin dan membina hubungan kerja.
- e. **Tidak baik** : Tidak mampu menjalin dan membina hubungan kerja.

### 4. Inovasi

Mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien sehingga lebih optimal.

- a. **Sangat baik** : Sangat mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja yang baru dan lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.
- b. **Baik** : Mampu meningkatkan cara dan prosedur kerja yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi sehingga mempengaruhi anggaran dan waktu kerja.
- c. **Cukup baik** : Hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan cara dan prosedur kerja yang ada dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.

### 5. Produktivitas

Produktivitas adalah pencapaian target fisik dari hasil pekerjaan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan realisasi anggaran dan waktu yang telah direncanakan.

- a. **Sangat Baik** : Melampaui target hasil kerja yang telah ditetapkan.
  - b. **Baik** : Sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.
  - c. **Cukup baik** : Cukup sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.
  - d. **Kurang baik** : Kurang sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.
  - e. **Tidak baik** : Tidak sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.
- 

## 6. Kepemimpinan

Kemampuan memimpin bawahan dan tim kerjanya untuk bekerjasama dalam pelaksanaan tugas.

- a. **Sangat baik** : Sangat mampu memimpin dan bekerjasama dalam pelaksanaan tugas.
- b. **Baik** : Mampu memimpin dan bekerjasama dalam pelaksanaan tugas.
- c. **Cukup baik** : Cukup mampu memimpin dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas .
- d. **Kurang baik** : Kurang mampu memimpin dan bekerjasama dalam pelaksanaan tugas.
- e. **Tidak baik** : Tidak mampu memimpin dan bekerjasama dalam pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 04 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 JANUARI 2014

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

Bobot Pekerjaan

NO.	SKPD	Eselon I, II dan Ess. III Mandiri	Sek/Kabag Keu/Kabag Umum	Ess. III	Eselon IV		Benda hara	Staf		JFT
					Kasubag Keu/Prog/KTU	Kasubag /Kasie		Adm	Teknis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sekretaris Daerah	1,14								
2	Asisten	1,13								
3	Staf Ahli	1,09								
4	Biro Pemerintahan	1,08		1,07		1,06	1,05	1,02	1,03	
5	Biro Hukum dan Organisasi	1,09		1,08		1,06	1,05	1,02	1,03	
6	Biro Umum	1,09	1,09	1,08	1,09	1,06	1,07	1,02	1,05	
7	Biro Humas dan Protokol	1,09		1,08		1,06	1,07	1,02	1,05	
8	Biro P2 E	1,09		1,08		1,06	1,05	1,02	1,03	
9	Biro PP Kesra	1,08		1,07		1,06	1,05	1,02	1,03	
10	Dinas PU	1,13	1,13	1,10	1,13	1,09	1,10	1,03	1,09	1,05
11	Dikbudpora	1,13	1,13	1,09	1,13	1,08	1,08	1,03	1,07	1,05
12	Dinas Keu. & Aset Daerah	1,12	1,12	1,09	1,12	1,08	1,09	1,03	1,04	1,05
13	Bappeda	1,12	1,12	1,09	1,12	1,08	1,08	1,03	1,04	1,05
14	Dinas Pertanian TP & H	1,12	1,12	1,09	1,12	1,08	1,09	1,03	1,06	1,05
15	Dinas Perikanan dan Kelautan	1,12	1,12	1,09	1,12	1,08	1,09	1,03	1,06	1,05
16	Dinas Kesehatan	1,12	1,12	1,09	1,12	1,08	1,09	1,03	1,06	1,05
17	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	1,12			1,12	1,08	1,09	1,03	1,06	1,05
18	BKPPD	1,11	1,11	1,09	1,11	1,08	1,09	1,03	1,04	1,05
19	Kantor Satpol PP dan Linmas	1,08			1,08	1,08	1,05	1,00	1,05	1,05
20	Inspektorat Provinsi Gorontalo	1,11	1,11	1,08	1,11	1,07	1,08	1,03	1,04	1,05
21	Sekretariat DPRD	1,09	1,09	1,07	1,09	1,06	1,08	1,02	1,04	1,05
22	Dinas Peternakan & Perkebunan	1,12	1,12	1,09	1,12	1,08	1,08	1,03	1,06	1,05
23	Dishubparkominfo	1,10	1,10	1,07	1,10	1,06	1,07	1,02	1,05	1,05
24	Dinas Kehutanan & ESDM	1,10	1,10	1,07	1,10	1,06	1,07	1,02	1,05	1,05
25	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag	1,10	1,10	1,07	1,10	1,06	1,07	1,02	1,05	1,05
26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,10	1,10	1,07	1,10	1,06	1,07	1,02	1,05	1,05
27	BPM-PDT	1,10	1,10	1,07	1,10	1,06	1,07	1,02	1,05	1,05
28	Dinas Sosial	1,10	1,10	1,05	1,10	1,04	1,05	1,02	1,04	1,05
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,09	1,09	1,05	1,09	1,04	1,05	1,02	1,04	1,05
30	Bakorluh	1,10	1,10	1,05	1,10	1,04	1,05	1,02	1,05	1,05
31	BPBD	1,09	1,09	1,05	1,09	1,04	1,05	1,02	1,03	1,05
32	BLH dan Riset Daerah	1,09	1,09	1,05	1,09	1,04	1,05	1,02	1,03	1,05
33	BPM-PTSP	1,08	1,08	1,03	1,08	1,02	1,03	1,02	1,03	1,05
34	Badan Ketahanan Pangan & PLJ	1,08	1,08	1,03	1,08	1,02	1,03	1,00	1,03	1,05
35	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1,07			1,07	1,02	1,02	1,00	1,02	1,05
36	Sekretariat KORPRI	1,07		1,03	1,07	1,02	1,03	1,00	1,02	1,05
37	Kantor Perwakilan Jakarta	1,07			1,07	1,03	1,03	1,00	1,02	1,05

Catatan :

1 Staf Teknis, terdiri dari:

- POKJA ULP UPT Dinas PU
- Pengawas Lapangan pada Dinas PU
- Penjaga Pintu Air pada Dinas PU
- Sopir Gubernur/Wakil Gubernur/Asisten/Kepala SKPD/Kepala Biro/Staf Ahli/Kepala Kantor
- Petugas Humas dan Protokol pada Biro Umum dan Humas yang ditetapkan dengan SK Gubernur
- Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dengan SK Gubernur
- Pengelola Program Aplikasi Sistem pada SKPD

2 Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditetapkan dengan SK Gubernur

3 Bendaharawan adalah bendahara yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 04 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 JANUARI 2014

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2014

PERHITUNGAN KINERJA JABATAN STAF

NAMA :

SKPD :

JABATAN :

MASA PENILAIAN :

NO.	INDIKATOR KINERJA	NILAI (%)	CAPAIAN (%)	BOBOT	NILAI KINERJA
1	2	3	4	5	6 (3 X 4 X 5)/100
1	Disiplin	30			
2	Tanggung Jawab	20			
3	Kerjasama	15			
4	Inovasi	5			
5	Produktifitas	30			
JUMLAH		100			

Staf yang dinilai

Pejabat yang menilai

.....

NIP.

.....

NIP.

PERHITUNGAN KINERJA JABATAN STRUKTURAL

NAMA :

SKPD :

JABATAN :

MASA PENILAIAN :

NO.	INDIKATOR KINERJA	NILAI (%)	CAPAIAN (%)	BOBOT	NILAI KINERJA
1	2	3	4	5	6 (3 X 4 X 5)/100
1	Disiplin	20			
2	Tanggung Jawab	20			
3	Kepemimpinan	20			
4	Inovasi	10			
5	Produktifitas	30			
JUMLAH		100			

Pejabat yang dinilai

Pejabat yang menilai

.....

NIP.

.....

NIP.

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 04 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 JANUARI 2014

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2014

**DASAR PERHITUNGAN TKD JABATAN FUNGSIONAL**

<b>Nama Jabatan /Tingkat Jabatan</b>	<b>Jenjang Jabatan</b>	<b>Golongan Ruang</b>	<b>Tunjangan Kinerja Daerah</b>
<b>Pengawas Sekolah</b>			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 2,800,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 3,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 3,500,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 4,000,000
<b>Pamong Belajar</b>			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 2,800,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 3,000,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 3,500,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 4,000,000
<b>Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan</b>			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 1,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 1,650,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 1,900,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 1,700,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 2,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 2,650,000
<b>Penera</b>			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 1,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 1,650,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 1,900,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 1,700,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 2,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 2,650,000
<b>Penguji Mutu Barang</b>			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 1,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 1,650,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 1,900,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 1,700,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 2,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 2,650,000

<b>Instruktur</b>				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,650,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,900,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	2,650,000
<b>Mediator Hubungan Industrial</b>				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	2,650,000
<b>Penyuluh Pertanian</b>				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,650,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,900,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,000,000
	Utama	V/d – IV/e	Rp	3,250,000
<b>Pengawasan Benih Tanaman</b>				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,650,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,900,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,250,000
<b>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)</b>				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,650,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,900,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,250,000
<b>Pengawas Benih Ikan</b>				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,650,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,900,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,500,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	4,750,000

<b>Pengawas Perikanan</b>				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,650,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,900,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,500,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	4,750,000
<b>Penyuluh Perikanan</b>				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	1,500,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,600,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	2,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,800,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	3,250,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4,750,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	6,000,000
<b>Penyuluh Kehutanan</b>				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,650,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,900,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,000,000
<b>Polisi Kehutanan</b>				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	1,500,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,600,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	2,900,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,750,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	1,900,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	2,100,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	3,500,000
<b>Medik Veteriner</b>				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,650,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,500,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	5,000,000

<b>Paramedik Veteriner</b>				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,650,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,900,000
<b>Pengawas Bibit Ternak</b>				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,650,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,900,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,000,000
<b>Perencana</b>				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	3,800,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,000,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	7,000,000
<b>Analisis Kepegawaian</b>				
Terampil	Pelaksana	II/c – II/d	Rp	1,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,650,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	1,900,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	2,750,000
<b>Widyaiswara</b>				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	3,600,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	5,100,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	7,000,000
<b>Auditor</b>				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1,500,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,650,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	2,300,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,650,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	3,250,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4,600,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	6,000,000

<b>Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)</b>				
Pengawas Pemerintahan	Pertama	III/a – III/b	Rp	1,650,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	3,250,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4,600,000
<b>Pustakawan</b>				
Terampil	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp	1,600,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	1,700,000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp	1,750,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2,000,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2,500,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3,000,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	3,500,000

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 04 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 JANUARI 2014

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

**PERHITUNGAN PEMOTONGAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ( PPh 21 )**

NO	URAIAN PENGHASILAN	BESARAN PPh 21	URAIAN PERHITUNGAN
1.	Gol. I dan II	0 %	
2.	Gol. III	5 %	
3.	Gol. IV	15 %	
<p><u>Catatan:</u></p> <p>1. Dasar pengenaan PPh adalah jumlah TKD yang terdapat pada kolom 10 Lampiran VI</p> <p>2. Contoh perhitungan</p> <p>a. Nining (Gol. II) menerima TKD PPh 21 0 % x Rp. 1.600.000.- = Rp1.600.000,- = Rp0,-</p> <p>b. Helmi (Gol. III) menerima TKD PPh 21 5 % x Rp. 2.600.000 = Rp2.600.000,- = Rp130.000,-</p> <p>c. Nurhayati, Ess. IIIA (Gol. IV) menerima TKD PPh 21 15 % x Rp. 3.750.000 = Rp3.600.000,- = Rp562.500,-</p> <p>d. Fachrudin, Ess. IIA (Gol. IV) menerima TKD PPh 21 15 % x Rp. 8.250.000 = Rp8.250.000,- = Rp1.237.500,-</p>			

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 04 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 JANUARI 2014

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

**DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA**

**NAMA SKPD** :

**PERIODE** :

No	Nama	Jabatan	Eselon	NPWP	Nilai Kinerja	Dasar TKD	Jumlah TKD	Potongan Hukuman Disiplin	Jumlah TKD sebelum PPh	Potongan PPh 21	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8 ( 6 x 7 )	9 (% pot x 8)	10	11	12 ( 10 – 11 )	13

Catatan:

1. Nilai kinerja kolom 6 adalah nilai kinerja yang diperoleh pada Lampiran III
2. Dasar TKD pada kolom 7 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
3. Perhitungan PPh 21, dapat dilihat pada Lampiran V

Menyetujui,

Kepala .....

Bendahara Pengeluaran

( )

( )

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 64 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 JANUARI 2014

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

**DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA**

**NAMA SKPD :**

**PERIODE :**

No	Nama	Jabatan	Eselon	NPWP	Nilai Kinerja	Dasar TKD	Jumlah TKD	Potongan Hukuman Disiplin	Jumlah TKD sebelum PPh	Potongan PPh 21	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 x 7)	9 (% pot x 8)	10	11	12 (10 - 11)	13

Catatan:

1. Nilai kinerja kolom 6 adalah nilai kinerja yang diperoleh pada Lampiran III
2. Dasar TKD pada kolom 7 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
3. Perhitungan PPh 21, dapat dilihat pada Lampiran V

Menyetujui,

Kepala .....

Bendahara Pengeluaran

( )

( )